Analisis Urgensi Fungsi *Victim Impact Statement* dalam Proses Peradilan Pidana

Herman, Ufran

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : herman.dompu@yahoo.com; ufran@unram.ac.id

Submitted: 30-12-2024; Reviewed: 26-03-2025; Revised:30-03-2025; Accepted: 30-03-2025

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i1.25394>

Abstract

The criminal justice system is implemented based on the provisions of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, thus involving the relationship between the perpetrator, victim, and state. The position of the victim in the criminal system is often ignored so that providing their rights for the losses incurred is not implemented properly. The victim impact statement is a concept that prioritizes protection for victims that can be implemented in Indonesia to protect the basic rights of victims. This research is juridical-normative research. Data collection uses primary legal sources in the form of laws and regulations and opinions of legal experts. Based on the results of the study, it shows that the Criminal Code has not clearly stated the real or direct formulation regarding the provision of legal protection for victims, while the Criminal Procedure Code regulates the position of victims as witnesses who can be asked for information about what they see, hear, or experience. The formation of laws and regulations and the regulation of victim impact statements must be based on appropriate parameters so that victims should be able to provide statements of impact on the criminal acts that occur.

Kata Kunci : Criminal Justice; Criminal Procedure Code; Victim Impact Statement

I. Pendahuluan

Tahapan peradilan pidana merupakan sebuah proses panjang yang di mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan definisi bahwa "Putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang dibuat dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa hukuman atau pembebasan."¹ Dalil tersebut mengisyaratkan bahwa putusan pengadilan dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman atau bebas dari segala bentuk tuntutan. Dalil putusan pengadilan juga harus mempertimbangkan syarat dan tata cara yang telah atur oleh undang-undang.

Putusan pengadilan lebih banyak berorientasi terhadap pelaku kejahatan yang sangat menekankan sifat retributif. Hak terlapor, tersangka, dan terdakwa dalam menyelesaikan perkara pidana seringkali dikedepankan, sementara akses hak oleh korban kejahatan jarang diprioritaskan. Seperti yang disampaikan oleh Andi Hamzah, bahwa kecenderungan pemenuhan hak tersangka lebih diperhatikan daripada hak-hak korban, lebih khusus berkaitan hak-hak yang melekat pada manusia (HAM).² Pemenuhan dan pengaturan terhadap hak-hak korban sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana baik yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana.

Muatan dan kedudukan hukum korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi korban. Posisi korban selama proses peradilan tidak dilihat sebagai pihak yang paling mengalami kerugian namun diposisikan sebagai saksi. Korban kejahatan dapat dihadirkan dalam proses peradilan dengan dua kualitas yang berbeda. Pertama, korban (*victim*) hadir sebagai saksi guna menerangkan suatu kejadian yang terjadi. Kondisi tersebut mengharuskan korban

¹ Soesilo. 2008. KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Edisi 1. Jakarta. Gama Press. Hlm. 182

² Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Edisi 1. Bandung: Bina Cipta. Hlm. 33

memberikan kesaksian berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dalam proses penanganan, baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang. Kedua, korban mewakili pihak yang dirugikan dan mengalami penderitaan atas suatu peristiwa hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus lebih diperhatikan dan diutamakan mengingat kerugian yang dialami oleh korban atas perbuatan pidana yang terjadi. *victim impact statement* dapat menjadi kesempatan bagi korban atau keluarga korban untuk menyampaikan pernyataan kepada hakim, baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikan dampak yang di alami akibat kejahatan orang lain. Pernyataan tersebut harus mencakup informasi tentang bagaimana kejahatan telah berdampak pada korban secara fisik, emosional, psikologis, dan finansial. Hakim dapat mempertimbangkan putusan yang adil bagi korban dan bagi terdakwa dengan memahami dampak yang dirasakan oleh korban secara langsung dan mendalam.³

Fenomena penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang belum berpihak pada korban sangat dipengaruhi oleh regulasi yang belum jelas dan belum sepenuhnya mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban.⁴ Mengutip dari Barda Nawawi Arief, bahwa pemenuhan hak korban masih bersifat “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, sebagian besar rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada substansinya memberikan perlindungan langsung bersifat abstrak terhadap kepentingan hukum bagi korban. Hal tersebut terjadi karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dipandang sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, melainkan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap “norma hukum atau ketertiban *in abstracto*” sehingga perlindungan bagi korban tidak berbentuk *in concreto*.⁵

Mengutip dari *The Federal State of Australia in the Crimes Sentencing Procedure Act 1999* korban justru diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan tertulis kepada pengadilan yang dikenal sebagai pernyataan dampak korban (*victim impact statement*). Pernyataan yang disampaikan korban mencakup rincian tentang bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana dampak terhadap korban sehingga mempengaruhi kehidupan korban”. Konsep tersebut menjadi dasar dan memberikan kesempatan kepada korban untuk secara leluasa menyampaikan dampak dari tindak kejahatan yang dialaminya.⁶

Sampai saat ini Eksekutif dan Legislatif di Indonesia terus membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai agenda khusus program legislasi nasional meski sempat tertunda puluhan tahun sebelum disahkan. Secara umum perubahan hukum acara pidana yang dirumuskan pada RUU KUHAP diharapkan dapat membawa arah baru lebih mendalam, menyeluruh tentang aspek-aspek yang diperlu dipertimbangkan bagi kepentingan korban kejahatan.⁷ Rumusan pasal-pasal dalam RUU KUHAP harus mengatur dengan tegas bahwa proses peradilan harus memperhatikan dampak tindak pidana bagi korban dan atau keluarganya. Pengampunan bagi korban dan atau keluarganya juga harus dipertimbangkan sebelum putusan dijatuhkan dalam RUU KUHAP. *Victim impact statement* juga dapat menjadi aspek penting dari RUU KUHAP yang dapat dikembangkan agar korban ditempatkan berdasarkan kedudukan dan kepentingannya.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum utama bagi pelaksanaan hukum acara pidana merupakan instrumen yang paling penting. Informasi yang diberikan oleh korban akan menjadi sarana tambahan para hakim untuk menilai suatu perkara pidana dari pihak korban. KUHAP yang berlaku saat ini mula dibentuk pada tahun 1980-an, era di mana negara memiliki kekuasaan yang sedemikian besar atau otoritarian. Tidak heran apabila instrumen hukum yang dihasilkan, termasuk KUHAP, pun tidak sejalan lagi dengan berbagai konvensi internasional yang berkembang saat ini.

³Yolanda Hosana. “*Victim Impact Statement* Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual”. *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 1171-84, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812>.

⁴ Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegahan Kejahatan*. Edisi 1. Bandung: Citra Aditya. Hlm. 75

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Kriminal*. Edisi 1. Bandung: Alumi Bandung. Hlm. 78

⁶ Muhammad Saef El-Islam. 2023. *Pernyataan dampak Korban Sebagai Pemulihan Hak-Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (Tesis). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm. 4

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono. 2014. *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam RUU KUHAP*. Edisi 1. Jakarta: Lembaga Reformasi Peradilan Pidana. Hlm. 1

Umumnya, konvensi internasional saat ini memiliki semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ada sejumlah isu penting sebagai bahan perubahan hukum acara pidana ini salah satunya adalah pemulihan korban tindak pidana. Berdasarkan hasil evaluasi, hukum acara pidana hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas lebih lanjut dengan fokus kajian bagaimanakah urgensi fungsi *victim impact statement* dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta bagaimanakah pengaturan fungsi *victim impact statement* dalam proses peradilan pidana di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Jenis penelitian ini penting dilakukan sebab ahli hukum dan praktisi hukum harus melihat hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan secara utuh, seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP). Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku dan jurnal yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan teknik formal mengacu kepada kaidah, aturan, atau pola bahasa tertentu.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Urgensi *Victim Impact Statement*

Dalam Instrumen Internasional tentang korban (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime an Abuse Power* 1985) diatur beberapa ketentuan yaitu : (a) akses terhadap keadilan dan perlakuan adil; (b) perlindungan; (c) dukungan dan bantuan; (d) kompensasi dan restitusi. Mengenai akses terhadap keadilan dan perlakuan adil, dalam deklarasi dinyatakan bahwa "*victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered*". Konsep tersebut dapat diartikan bahwa akses keadilan dan perlakuan adil terhadap korban dengan memperlakukan penuh kasih sayang dan hormat untuk martabat korban sebagai manusia. Korban mempunyai hak untuk mengakses mekanisme keadilan serta meminta ganti rugi atas bahaya yang ditimbulkan.

Korban juga memiliki berbagai kebutuhan perlindungan. Deklarasi tentang Korban menekankan bahwa "*taking measures to minimize inconvenience to victim, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation*". Konsep tersebut menjelaskan bahwa proses peradilan dan administrasi harus responsif terhadap kebutuhan korban, fasilitas yang ada harus mendukung kebutuhan korban untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi korban, melindungi privasi korban, serta memastikan keselamatan korban, keluarga dan saksi dari intimidasi dan pembalasan.

Deklarasi Perlindungan Korban disebutkan bahwa : "*victims should receive the necessary material, medical, psychological and social assistance through governmental, voluntary, community-based and indigenous means*". Konsep tersebut menjadi dasar bahwa para korban umumnya membutuhkan dukungan dan bantuan yang penting untuk pemulihan korban seperti bantuan emosional, psikologis, finansial, hukum atau praktis. Pemberian dukungan terhadap korban dapat membantu mencegah masalah yang lebih besar dan kompleks yang mungkin dihadapi para korban di masa depan. Korban harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya sebagai manusia,

serta diberi hak-hak untuk menuntut ganti rugi, kompensasi dan restitusi melalui mekanisme hukum dan proses administrasinya harus memungkinkan dan mendukung korban untuk mendapatkan haknya.⁸

Pernyataan dampak yang dialami dan dirasakan oleh korban atas tindak pidana yang dialaminya sangat penting untuk dilakukan. Setidaknya terdapat 4 (empat) bidang utama yang harus diperhatikan dalam pernyataan yang dilakukan oleh korban yaitu memberikan informasi, memberikan manfaat bagi korban, menjelaskan bahaya kejahatan kepada pelaku, dan meningkatkan keadilan yang dirasakan dari hukuman. Pernyataan dampak korban dapat mencakup :

1. Ringkasan kerusakan fisik dan psikologis atau trauma yang diderita korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut dan intervensi medis / gigi yang diperlukan, baik satu kali atau berkelanjutan;
2. Ringkasan kerugian finansial atau kerusakan yang diderita korban sebagai akibat dari kejahatan, termasuk kehilangan gaji atau kemampuan untuk bekerja, dan permintaan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan sendiri;
3. Reaksi atau keberatan korban terhadap hukuman yang diusulkan atau disposisi remaja, termasuk penjara / waktu penjara, hak istimewa pembebasan kerja, pilihan layanan masyarakat, program pengobatan, dan / atau kondisi masa percobaan;
4. Pernyataan tentang hasil apa yang diinginkan oleh korban dan alasannya;
5. Sorotan tentang korban, termasuk pencapaian masa lalu, harapan untuk masa depan, dan bagaimana kejahatan berdampak pada aktivitas ini;
6. Perubahan gaya hidup, seperti kemampuan untuk bekerja, mengemudi, atau relokasi paksa;
7. Efek kematian mendadak pada anggota keluarga, seperti kehilangan harapan, mimpi, cinta, persahabatan, dan keamanan finansial;
8. Dampak keseluruhan dari insiden tersebut terhadap korban dan keluarganya.

Dalam membahas urgensi *victim impact statement* maka harus dilihat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dalam Pasal 115 yang meliputi landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada 4 (empat) parameter yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politik, dan landasan sosiologis.⁹

1. Aspek Filosofis

Victim impact statement harus mempertimbangkan nilai-nilai sila dalam Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia dan tindakan hulum seluruh masyarakat hukum, ahli hukum, dan praktisi hukum.

2. Aspek Yuridis

Pembentukan pengaturan mengenai *victim impact statement* maka undang-undang yang relevan digunakan sebagai dasar yuridis yaitu :

- a) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk kewajiban dari suatu negara. Korban sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan dampak korban merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diatur mengingat dalam UUD NRI 1945 telah menjamin hak setiap orang di hadapan hukum.

⁸ Hardianto Djanggih, 2018, *Konsepsi Keadilan dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. Hal. 6, diakses 12 Oktober 2024, <https://osf.io/3jfq/download>

⁹ Nanda Novia Putri dkk, 2018. *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Hal. 3, diakses 10 Oktober 2024, https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_AsasAsas_Pembentukan_Peraturan_Perundang_undangan_yang_baik/limk/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/download/

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat (1) UU HAM merumuskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk disini adalah hak korban kejahatan yang berusaha untuk mendapatkan keadilan terhadap dirinya melalui upaya turut serta memberikan keterangan di persidangan mengenai dampak kejahatan yang menimpanya. Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak korban dalam persidangan guna kepentingan bersama.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU HAM merumuskan bahwa “(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum dan (2) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Setiap orang yang dimaksud termasuk juga korban sebagai pencari pengakuan dan jaminan perlindungan serta keadilan dalam proses peradilan pidana. Keterkaitan korban dalam proses persidangan untuk memberikan keterangan, maka para penegak hukum harus mengakui keberadaan korban serta memberikan jaminan perlindungan dan kepastian dihadapan hukum mengenai dampak-dampak kejahatan terhadap diri korban.

Pasal 25 UU HAM merumuskan bahwa “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang atau dalam hal ini salah satunya adalah korban, berhak untuk menyampaikan pendapatnya di muka persidangan guna untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian yang telah dialaminya.

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP telah menyediakan mekanisme penggabungan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti bersalah sehingga menyebabkan ganti kerugian bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP. Pasal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP secara implisit mengatur perlindungan terhadap korban, namun dalam hal beracara atau mekanisme penggantian kerugian. KUHAP sebenarnya sudah meletakkan landasan pikir dan konsep terhadap perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses persidangan, namun pengaturan tersebut belum cukup untuk memberikan keterlibatan korban dalam proses persidangan. Keterlibatan yang dimaksud adalah korban dilibatkan secara aktif untuk memberikan keterangan mengenai dampak yang diderita akibat kejahatan yang menimpanya.

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 5 mengatur antara lain mengenai hak korban tentang “memperoleh informasi tentang perkembangan kasus, memperoleh informasi tentang putusan pengadilan, memperoleh informasi mengenai hal terpidana dibebaskan” namun dalam pasal tersebut tidak ada pengaturan mengenai hak korban untuk ikut terlibat dalam pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu mengenai hak untuk didengar keterangan dampak kejahatan terhadapnya, karena seharusnya korban diberikan hak untuk dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai salah satu bentuk mengungkap kejahatan dan bentuk pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

3. Aspek Politik

Berkaitan dengan sikap politis pemerintah dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban, antara lain :

a) Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia telah mengakomodasi sebagian dari *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* 1985 untuk lebih berfokus pada korban kejahatan saja yang telah

dirumuskan secara terpisah dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, guna mewujudkan perlindungan kepada korban kejahatan secara khusus.

b) Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) merupakan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK difungsikan untuk mewujudkan keadilan bagi korban guna memberikan perlindungan bagi korban kejahatan.¹⁰ Layanan LPSK terhadap saksi dan korban, antara lain (a) memberikan layanan dan jaminan perlindungan fisik; (b) memberikan jaminan hukum dan layanan yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan; (c) memberikan layanan dukungan pembiayaan; (d) memberikan layanan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹ Mengacu pada poin b tentang “pemberian jaminan hukum” dapat dimaknai LPSK berkewajiban untuk memberikan layanan hukum bagi korban pada saat proses peradilan. LPSK juga harus memastikan setiap korban dalam proses peradilan pidana terjamin hak-haknya untuk memperoleh keadilan.

c) Membuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana dikutip dari Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan perubahan undang-undang tersebut agar tujuan dibentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara ideal dapat dicapai dengan memberikan perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga saksi yang terlibat (pelaku). Perubahan undang-undang bertujuan dalam mengungkap kejahatan harus melibatkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Perlindungan yang diberikan berorientasi pada perlindungan korban kejahatan untuk memberikan rasa aman terhadapnya.

d) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengatakan bahwa “Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara, hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.” Makna “memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara” apabila dikaitkan dengan keberadaan korban dalam proses peradilan pidana maka korban kejahatan sudah seharusnya mendapatkan kepastian atas terlaksananya keadilan yang seluas-luasnya bagi dirinya yang sudah menjadi tanggung jawab dari Negara.

4. Aspek Sosiologi

Landasan sosiologis dipilih berdasarkan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pembentukan *victim impact statement* di Indonesia, antara lain :

a) Kondisi penyelesaian kasus di masyarakat.

Kondisi penyelesaian kasus tindak pidana di Indonesia cenderung tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat, khususnya korban. Banyak putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim cenderung memberikan hukuman yang ringan terhadap pelaku tindak pidana. Mengutip dari mediaindonesia.com bahwa masyarakat merasa kurang puas terhadap putusan pengadilan pada kasus kekerasan seksual di Indonesia karena pidana yang dijatuhkan relatif

¹⁰ Al. Wisnubroto, 2007, Problematika dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia 25 (1): 82, diakses 12 Oktober 2024, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1142>

¹¹ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024

rendah yaitu hanya sepertiga dari tuntutan jaksa.¹² Contoh lainnya pada kasus pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr, Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 4 tahun kepada terdakwa dimana hukumannya cukup ringan untuk kasus pemerkosaan. Sesuai ketentuan Pasal 285 KUHP pelaku pemerkosaan dapat diberikan hukuman maksimal mencapai 12 tahun. Penyelesaian kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerkosaan di Indonesia cenderung tidak memberikan kepuasan terhadap korban, karena hakim dianggap terlalu ringan menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

b) Dampak negatif jika tidak ada *victim impact statement*.

Korban kejahatan seringkali tidak mendapatkan keadilan, karena sistem peradilan pidana yang cenderung lebih memikirkan hak pelaku kejahatan. Korban hanya dibutuhkan saat memberikan keterangan di persidangan saja tanpa melihat dampak dari kejahatan yang dialami terhadap finansialnya, psikologisnya, ekonominya dan lain sebagainya. Hakim dalam memberikan putusan pengadilan tidak mempertimbangkan pula dampak kejahatan tersebut kepada korban. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi jika *victim impact statement* tidak diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia, antara lain: a) Hak untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan cenderung tidak terpenuhi karena ketika putusan hakim hanya mempertimbangkan sisi pelaku tanpa mempertimbangkan sisi dampak korban cenderung tidak memberikan kepuasan terhadap korban. b) Korban tidak dapat turut andil dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim. c) Hakim cenderung lebih memikirkan dan melihat dari sisi terdakwa saja, hal ini menjadikan ketidakseimbangan keadilan bagi terdakwa dan korban. d) Proses peradilan di Indonesia akan lebih cenderung memikirkan pelaku, tanpa memikirkan korban yang jelas sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan pelaku. e) Hak untuk bebas menyampaikan pendapat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia cenderung tidak terpenuhi, karena korban tidak bisa menyampaikan pendapatnya mengenai hal-hal yang dirasakan atas kejahatan yang menimpanya, sedangkan terdakwa mendapatkan prioritas dengan memberikan keterangan saat persidangan.

c) Manfaat adanya *victim impact statement*.

Dampak terhadap korban jika *victim impact statement* diterapkan di Indonesia antara lain memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan mengenai dampak kejahatan yang terjadi pada korban dengan melibatkan atau mengikutsertakan korban dalam proses peradilan guna menanamkan rasa puas terhadap proses peradilan. Menciptakan jalan untuk penyembuhan dan pemulihan psikologis korban. Retributif sebagai salah satu tujuan hukuman dapat lebih ditingkatkan ketika hal-hal yang merugikan korban dapat diungkap di persidangan oleh korban. Memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa sistem peradilan pidana tanggap terhadap kebutuhan korban maupun keluarga korban sehingga dapat menanamkan kepercayaan pada masyarakat terhadap sistem peradilan. Meningkatkan kerjasama korban dengan sistem peradilan pidana di masa depan, supaya dapat meningkatkan efisiensi sistem. Membantu menyadarkan pelaku, hakim, publik dan media mengenai dampak kejahatan yang menimpakan korban.

3.2. Pengaturan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Korban kejahatan mempunyai fungsi sebagai pemberi kesaksian atau keterangan dalam persidangan dan sebagai pencari keadilan. Korban sebagai pemberi kesaksian atau keterangan dalam persidangan disebut sebagai saksi yang mempunyai fungsi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat, dialami, atau didengar. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana dengan menyebut alasan dari keterangannya tersebut. Korban sebagai pencari keadilan membutuhkan pemenuhan hak-haknya yang dirampas oleh pelaku kejahatan akibat dari kejahatan yang dilakukan hingga menimbulkan kerugian bagi korban.

Pengaturan kedudukan korban tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP belum maksimal jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku. KUHP belum menegaskan secara jelas terkait dengan

¹² Aditya Pradana Putra. 2016. "Rata-rata Vonis Kejahatan Seksual Cuman 51 Bulan". diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/71165/rata-rata-vonis-kejahatan-seksual-51-bulan>

perumusan yang nyata atau langsung mengenai pemberian perlindungan hukum bagi korban, sebagai contoh dalam hal penjatuhan pidana seharusnya juga mempertimbangkan pengaruh dari tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku terhadap korban atau keluarga korban, namun pada faktanya rumusan dalam pasal KUHP lebih membahas terkait dengan perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana saja. Pengaturan KUHP juga hanya menjelaskan kedudukan korban sebagai saksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) mengatur beberapa hak korban sebagai saksi dalam suatu sistem peradilan pidana yaitu:

1. Hak yang utama yang harus diberikan kepada korban yaitu hak untuk dilindungi atas keamanan pribadi, keluarganya serta harta bendanya dan juga bebas dari berbagai ancaman, karena perlindungan tersebut menjadi perlindungan utama yang dibutuhkan oleh korban;
2. Korban dalam memberikan keterangan harus tanpa adanya tekanan dari pihak manapun apalagi mengalami suatu intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Korban yang memberikan keterangan di bawah tekanan maka keterangan yang diberikan tidak akan terungkap dengan sejelas-jelasnya dari peristiwa tindak pidana yang telah dialaminya, sehingga dampaknya pada kebenaran materiil tidaklah dapat ditegakkan.¹³

Penerapan *victim impact statement* dalam sistem peradilan pidana Indonesia meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

KUHP belum terdapat peraturan yang secara eksplisit memberikan perlindungan bagi korban, hanya mengatur mengenai hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana namun tidak selengkap hak pelaku tindak pidana. Pasal 7 ayat (1) huruf i jo Pasal 109, Pasal 13 huruf h Jo. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang korban, namun korban dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara faktual hak korban yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan tersebut.¹⁴ KUHP mengatur 3 (tiga) hak yang memungkinkan korban kejahatan mendapatkan haknya dalam proses peradilan pidana, antara lain korban berhak untuk dapat mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan, korban berhak untuk melapor dan berkewajiban untuk menjadi saksi serta berhak menuntut ganti kerugian.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai hak korban yaitu :

1. Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, dan bebas dari segala ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. Turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan untuk dirinya;
3. Tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan;
4. Memperoleh penerjemah;
5. Terbebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Memperoleh informasi tentang perkembangan kasus;

¹³ Alen Triana Masania. 2015. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lex Crime IV (7) : 13, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10087/9673>

¹⁴ Mudzakkir. 2011. "Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum* 14 (1) : 31, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024, <https://journal.uui.ac.id/LexRenaissance>

7. Memperoleh informasi tentang putusan pengadilan;
8. Memperoleh informasi mengenai hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Memperoleh identitas baru;
11. Memperoleh tempat kediaman sementara;
12. Memperoleh tempat kediaman yang baru;
13. Mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Memperoleh penasihat hukum;
15. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
16. Memperoleh pendampingan.

Berdasarkan ketentuan pengaturan tentang korban maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur beberapa hak korban kejahatan secara eksplisit terlepas dari KUHP yang belum mengatur hak korban secara implisit. Ketentuan pasal yang mengatur mengenai hak korban yang berkaitan erat dengan penyelesaian perkara pidana, sebagaimana disebutkan dalam huruf "(f) Memperoleh informasi tentang perkembangan kasus; (g) Memperoleh informasi tentang putusan pengadilan; (h) Memperoleh informasi mengenai hal terpidana dibebaskan" sedangkan hak korban untuk memberikan keterangan mengenai dampak kejahatan yang menimpa dirinya tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Konsep *victim impact statement* menyebabkan pergeseran paradigma pidana dari pelaku-sentris (*offender-oriented*) ke korban-sentris (*victim-oriented*). *Victim impact statements* merupakan sebuah konsep yang sangat umum untuk mengatasi solusi ketidakseimbangan hak pelaku dan korban kejahatan bagi banyak negara di seluruh dunia. Perlindungan hukum terhadap korban dapat diimplementasikan dengan baik melalui *victim impact statements* dimana korban diberikan kesempatan dan ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan serta kerugian yang timbul terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kanada merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sukses menerapkan konsep *victim impact statement* yang diatur dalam *the Canadian Criminal Code* 1988. Korban dapat menyatakan *victim impact statement* yang diatur lebih lanjut di dalam *Criminal Code of Canada*, Bill C-89 bahwa : "*The court shall... permit the victim to read a statement...or present the statement in any other manner that the court considered appropriate*". Penyampaian *victim impact statement* di Kanada dapat dilakukan baik itu secara tertulis maupun dibacakan secara langsung. Masih sedikit korban yang menyampaikan *victim impact statement* secara langsung meskipun demikian korban tetap merasakan pengalaman yang meningkat sangat signifikan untuk mengetahui haknya. Pernyataan *victim impact statement* secara tertulis biasanya menggunakan sebuah formulir yang harus diisi oleh korban atau keluarganya. Robert dan Edgar pada tahun 2006 melakukan penelitian di tiga provinsi di Kanada untuk menanyakan kepada para hakim apakah *victim impact statement* berpengaruh terhadap pemberian putusan. Sebanyak 62% hakim pada Provinsi British Columbian menyampaikan terdapat sedikit penurunan yaitu 59% pada Provinsi Manitoba, serta paling rendah 35%. Hakim pada provinsi Alberta menyatakan bahwa *victim impact statement* berguna saat pemberian putusan.¹⁵

Contoh penerapan *victim impact statement* lainnya adalah Belanda sebagai negara *civil law* yang berhasil menerapkan *victim impact statement*. Dalam *Article 302 of the Code of Criminal Procedure (wetboek van Strafvordering)* disebutkan bahwa : "*Victim or a relative can make a statement about the impact of the crimes (crimes with a prison sentence of at least eight years or the crimes mentioned in the article*". Pasal tersebut menjelaskan bahwa korban atau keluarganya dapat membuat pernyataan tentang dampak dari suatu tindak pidana (tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 8 (delapan) tahun atau tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini). *Victim impact statement* hanya boleh berisi tentang

¹⁵ Muhammad Saef El-Islam. 2023. *Victim Impact Statement Sebagai Pemulihan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di akses pada tanggal 1 oktober 2024.

apa saja dampak dari tindak pidana yang dilakukan, bukan tentang bagaimana tindak pidana itu terjadi. Secara umum penggunaan *victim impact statement* di negara Belanda sama dengan yang digunakan di negara Kanada. Pengalaman negara Kanada dan Belanda dalam menerapkan sudah dan sedang diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Sasaran penggunaannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada korban kejahatan untuk memulihkan hak-haknya yang terderogasi.

KUHAP secara filosofis dinilai sebagai karya agung Bangsa Indonesia dan diakui mengandung asas-asas yang inovatif serta pengaturannya yang paralel dengan instrumen hukum internasional. KUHAP dibentuk pada tahun 1980-an, era di mana negara memiliki kekuasaan yang sedemikian besar atau otoritarian. Kemajuan dan berkembangnya instrumen hukum menjadikan KUHAP saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. KUHAP perlu ditinjau ulang atas nilai-nilai dan standard-standar yang ada didalamnya yang disesuaikan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik sebagaimana yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan isi dari konvensi dimaksud.¹⁶ Umumnya, konvensi internasional saat ini memiliki semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ada sejumlah isu penting sebagai bahan perubahan hukum acara pidana ini salah satunya adalah pemulihan korban tindak pidana. Berdasarkan hasil evaluasi, hukum acara pidana saat ini hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana.¹⁷

Akhir Desember 2012 RUU KUHAP telah diajukan oleh pemerintah dan mulai dibahas di DPR RI dengan membentuk Panja di Komisi III DPR RI. Sampai saat ini RUU KUHAP belum juga disahkan. Berdasarkan draf RUU KUHAP yang beredar penulis menemukan bahwa tidak ada satu pasal tunggal yang secara eksplisit memuat pengaturan tentang *victim impact statement* namun terdapat pasal yang memberikan penegasan mengenai hak korban untuk mendapatkan informasi, hak untuk didampingi, hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, dan hak untuk mendapatkan restitusi; mengatur mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melindungi korban dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan, serta memberikan bantuan psikologis kepada korban. Pasal dalam RUU KUHAP juga memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif, di mana korban dan pelaku dapat berdialog untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. RUU KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia terhadap penerapan *victim impact statement* belum mengatur standarisasi format seperti menyusun pedoman yang jelas mengenai format dan isi *victim impact statement* agar memudahkan korban untuk menyusun pernyataannya. RUU KUHAP juga belum mengatur standarisasi fasilitas yang memadai untuk korban dalam menyampaikan *victim impact statement* baik secara langsung maupun melalui rekaman video.

IV. Simpulan

Korban sangat penting untuk dapat memberikan pernyataan dampak atas dirinya, dalam 4 (empat) bidang utama yaitu memberikan informasi, memberikan manfaat bagi korban, menjelaskan bahaya kejahatan kepada pelaku, dan meningkatkan keadilan yang dirasakan dari hukuman. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengaturan *victim impact statement* harus didasarkan pada 4 (empat) parameter yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politik, dan landasan sosiologis. Pengaturan kedudukan korban tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHAP belum maksimal jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku. KUHAP belum menegaskan secara jelas terkait dengan perumusan yang nyata atau langsung mengenai pemberian perlindungan hukum bagi korban karena hanya berfokus pada pelaku kejahatan sehingga hak-hak korban yang seharusnya dibutuhkan dan diperhatikan menjadi terabaikan. Rumusan dalam pasal KUHAP lebih membahas terkait dengan perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana saja sedangkan pengaturan korban dalam KUHAP hanya menjelaskan kedudukan korban sebagai saksi.

Daftar Pustaka.

Aditya Pradana Putra. 2016. "*Rata-rata Vonis Kejahatan Seksual Cuman 51 Bulan*". diakses pada tanggal 12 Oktober 2024,

¹⁶<https://icjr.or.id/memperkuat-rancangan-kuhap-yang-pro-pemberantasan-korupsi-transparan-dan-akuntabel/> di akses pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024.

¹⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-isu-penting-dalam-perubahan-kuhap-lt63a1ac385598f/>. di akses pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024

- Al. Wisnubroto, 2007, *Problematika dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia 25 (1): 82, diakses 12 Oktober 2024, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1142>
- Alen Triana Masania. 2015. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lex Crime IV (7) : 13, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10087/9673>
- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Edisi 1. Bandung: Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegahan Kejahatan*. Edisi 1. Bandung: Citra Aditya.
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegahan Kejahatan*. Edisi 1. Bandung: Citra Aditya.
- Hardianto Djanggih, 2018, *Konsepsi Keadilan dalam Perlindungan Saksi dan Korban*. Hal. 6, diakses 12 Oktober 2024, <https://osf.io/3jfq/download>
- Mudzakir. 2011. "Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP". Jurnal Ilmu Hukum 14 (1) : 31, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024, <https://journal.uui.ac.id/LexRenaissance>
- Muhammad Saef El-Islam. 2023. *Victim Impact Statement Sebagai Pemulihan Hak Korban Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di akses pada tanggal 1 oktober 2024.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori dan Kebijakan Kriminal*. Edisi 1. Bandung: Alumi Bandung.
- Muhammad Saef El-Islam. 2023. *Pernyataan dampak Korban Sebagai Pemulihan Hak-Hak Korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (Tesis). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nanda Novia Putri dkk, 2018. *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Hal. 3, diakses 10 Oktober 2024,
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024
- Soesilo. 2008. *KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Edisi 1. Jakarta. Gama Press.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2014. *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam RUU KUHP*. Edisi 1. Jakarta: Lembaga Reformasi Peradilan Pidana.
- Yolanda Hosana. "Victim Impact Statement Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual". *Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 1171-84, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35812>.
https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_AsasAsas_Pembentukan_Peraturan_Perundang_undang_yang_baik/limk/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/download/
<https://mediaindonesia.com/humaniora/71165/rata-rata-vonis-kejahatan-seksual-51-bulan>
<https://icjr.or.id/memperkuat-rancangan-kuhp-yang-pro-pemberantasan-korupsi-transparan-dan-akuntabel/> di akses pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-isu-penting-dalam-perubahan-kuhp-lt63a1ac385598f/>. di akses pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024